

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
LAMPUNG DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM LAMPUNG
MERAWAT INDONESIA TAHUN 2023**

SKRIPSI

Oleh

ALAN ASKA NICOLA

NPM: 1746021001



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

Oleh :

Alan Aska Nicola

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia mulai tergerus oleh berbagai ideologi lain yang masuk, seperti paham Radikalisme, intoleran, yang menyebabkan konflik dan ketidakstabilan situasi di Lampung, kondisi ini diperparah dengan penetapan Lampung menjadi salah satu zona merah untuk kasus radikalisme, belum lagi kasus intoleran yang terjadi di Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam Implementasi Program Lampung Merawat Indonesia sudah berjalan dengan baik melalui teori Peran menurut Gede Diva (2009) terdiri dari Peran Fasilitator, peran Regulator, dan Peran Katalisator.. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif, penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam peran Fasilitator telah melaksanakan peran berupa penyediaan sarana dan prasarana pada pelaksanaan kegiatan. Dalam peran pembinaan berupa pembinaan dan sosialisasi dengan sasaran Sekolah Menengah Atas, pembinaan kepada Perguruan Tinggi, pembinaan kepada Partai Politik dan Organisasi Masyarakat dan pembinaan pada Masyarakat umum. Dalam peran Regulator Melaksanakan peran berupa pembuatan program dan kegiatan yang berkaitan dengan implementasi program Lampung Merawat Indonesia, dalam peran manajerial melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pihak yang terkait dengan program yang dilaksanakan. Dalam peran katalisator melaksanakan peran berupa pembuatan web badan kesatuan bangsa dan politik provinsi Lampung dalam rangka untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan apa yang dibuat, serta pelaksanaan program yang telah dilakukan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang relevan.

Kata Kunci : *Peran Kesbangpol, Implementasi Program, Fasilitator, Regulator, Katalisator.*

ABSTRACT

By :

Alan Aska Nicola

Pancasila as the philosophy of life of the Indonesian nation has begun to be eroded by various other ideologies that have entered, such as radicalism and intolerance, which have caused conflict and instability in the situation in Lampung. This condition is made worse by the determination of Lampung as one of the red zones for cases of radicalism, not to mention cases of intolerance which happened in Lampung. This research aims to find out whether the role of the Lampung Province National and Political Unity Agency in the Implementation of the Lampung Caring for Indonesia Program has gone well through Role theory according to Gede Diva (2009) consisting of the Role of Facilitator, the Role of Regulator, and the Role of Catalyst. This Research Uses Methods Descriptive with a Qualitative Approach, determining informants using purposive sampling techniques. The results of this research show that in the role of Facilitator he has carried out the role of providing facilities and infrastructure for implementing activities. The coaching role is in the form of coaching and outreach targeting high schools, coaching to universities, coaching to political parties and community organizations and coaching to the community. In the regulatory role, carry out the role of creating programs and activities related to the implementation of the Lampung Care for Indonesia program. In the managerial role, carry out communication and collaboration with parties related to the program being implemented. In the role of catalyst, it carries out the role of creating a website for the national and political unity body of Lampung province in order to provide information to the public regarding what programs and policies have been made, as well as the implementation of programs that have been carried out so that the public gets relevant information.

Keywords: Role of Kesbangpol, Program Implementation, Facilitator, Regulator, Catalyst.

Judul Skripsi : PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI LAMPUNG DALAM
IMPLEMENTASI PROGRAM LAMPUNG
MERAWAT INDONESIA TAHUN 2023

Nama Mahasiswa : Alan Aska Nicola

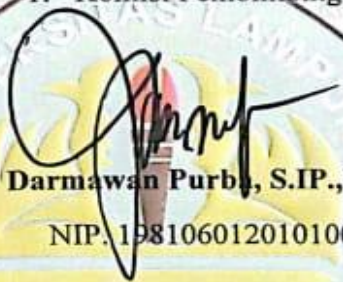
Nomor Pokok Mahasiswa : 1746021001

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Darmawan Purb, S.IP.,M.IP

NIP. 1981060120101003

2. Komisi Pembimbing



Bendi Juantara, S.IP.,M.A

NIP. 198809232019031011

3. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



Drs. R Sigit Krisbintoro, M.I.P.

NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Darmawan Purba, S.IP.,M.IP

Sekretaris : Bendi Juantara, S.IP.,M.A.

Penguji : Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 September 2023.

PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 9 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan




Alan Aska Nicola
NPM. 1746021001

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Alan Aska Nicola, dilahirkan di pekon Kejadian, kecamatan Belalau, kabupaten Lampung Barat. Yang merupakan anak pertama dari Tiga bersaudara, putra Pertama dari pasangan Bapak Akmansyah dan Ibu Aslina. Jenjang Pendidikan Penulis dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 03 Batu Kebayan pada tahun 2006-2011. Setelah lulus, penulis menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Batu Ketulis pada tahun 2011-2014 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 14 Bandar Lampung pada tahun 2014-2017. Pada tahun 2017, Penulis melanjutkan jenjang Pendidikan yang lebih tinggi dengan tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Ujian Masuk Lokal Program S1 Pararel Tahun 2017.

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila Penulis mengikuti berbagai kegiatan baik akademik maupun non akademik dalam menunjang kapasitas diri Penulis. Penulis bergabung pada Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan menjadi Sekrearis Rayon pada tahun 2018. Selanjutnya Pada tahun 2020 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 2 pada tahun 2020 di Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

“Keberanian Itu Seperti Sikap Keberimanan, Jika Kau Peroleh Keberanian Maka Kau Memiliki Harga Diri Dan Sifat Bermartabat Yang Membuatmu Tidak Mudah Dibujuk.”

(Ernesto Che Guevara)

“Tujuan Pendidikan Itu Mempertajam Kecerdasan, Memperkukuh Kemauan, Serta Memperhalus Perasaan.”

(Tan Malaka)

“Seseorang Yang Berjuang Untuk Orang Lain Akan Lebih Kuat Dalam Menghadapi Sulitnya Kehidupan, Sikap Tidak Putus Asa, Ketekunan, Dan Tekad Yang Kuat. ”

(Alan Aska Nicola)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar hambaMu,

Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan Shalawat beriring salam, senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di *Yaumul Akhir Aamiinnn*

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa

Bapak Dan Ibu Tercinta

Akmansyah Dan Aslina

Serta Adikku

Diko Aska Reksa Dan Assyifa Putri

Terimakasih untuk semua kesabaran, do'a dan dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai. Semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung Dalam Implementasi Program Lampung Merawat Indonesia Tahun 2023”**. Sholawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW, sungguh Gerakan revolusioner yang telah dicatat dalam sejarah selalu memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membant dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Darmawan Purba, S.IP.,M.IP., selaku dosen pembimbing utama, terimakasih bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga penulis membuat skripsi ini dengan sebaiknya-baiknya;

5. Bapak Bendi Juantara, S.IP.,M.A., selaku dosen pembimbing Pembantu, terimakasih bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga penulis membuat skripsi ini dengan sebaiknya-baiknya;
6. Bapak Drs R Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Dosen Penguji, terimakasih Bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
7. Bapak Darmawan Purba, S.IP.,M.IP., Selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga penulis membuat skripsi ini dengan sebaiknya-baiknya;
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai ke posisi saat ini. Terimakasih atas segala yang engkau berikan;
9. Kedua orang tua ku, Bapak Akmansyah dan Ibu Aslina yang selalu menyertai Langkah ku dengan doa, menjaga dengan penuh kasih sayang, menuntun dengan sabar, mengorbankan segala hal dengan sepenuh hati untuk membesarkan dan mewujudkan mimpi-mimpi ku;
10. Kepada adikku ku Diko Aska Reksa dan Assyifa Putri, terimakasih senantiasa menyertai langkah ku dengan doa, memberikan dorongan, dukungan dan semangat. Semoga apa yang kita harapkan dan cita-citakan dapat tercapai;
11. Kepada Keluarga Besar Lamban Kagungan, khususnya Atin Ahmad Victorrys Putra Negara, Kaka Batin Dina Shania Harli dan keluarga , Pak Batin Barzawan Anwar dan keluarga, Udo Antariksa Putra Negara dan keluarga, Cikwo Meri Selvia dan keluarga, Mulia Selvia dan keluarga, Alak Herman dan keluarga Ina batin Zuria Dewi dan Keluarga, Alak Darmawan Anuar dan keluarga dan Unik Indra Gunawan dan keluarga. Terimakasih sudah sabar menunggu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai;

12. Kepada Keluarga besar Sukadana, Khususnya Mamak Almasir dan keluarga. Among Asri, Unik Aprodi dan keluarga, unik aryati dan keluarga, Unik Arnida dan keluarga, Minan Azmia dan keluarga, dan mamak Annazer. Terimakasih sudah sabar menunggu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai;
13. Kakak dan adik Sepupu Mamak Alamasir, Udo Andryan, udo asa, cikwo Riska mawarni, Abang Saifuloh, Adik-adikku Yulia Nisa Persada, Rahmat arya setiawan, Erlinda, Vera Rosa Persada, Reza Merviriando, Elva Ramadhan, Hendra, Elsa Yulita, Prayudi Anbia Persada, Adinda Puspita Putri, Aulia Gunatama, Rahmasari, Erlia, Terimakasih sudah sabar menunggu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai;
14. Kepada Informan Peneliti, Saprul Al Hadi, S.STP,MM selaku Kepala Bagian Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa, Bapak Drs Fardynansyah, M.Si selaku Kepala Sub Bidang Bela Negara Dan Wawasan Kebangsaan, saya ucapkan terimakasih telah bersedia meluangkan waktu dan tempat untuk saya sehingga saya dapat berdiskusi dan memperoleh informasi untuk mendapatkan hasil wawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua, Aamiin;
15. Kepada seluruh Aparatur badan kesatuan bangsa dan politik provinsi lampung, terimakasih atas waktu, tempat dan ilmu yang kalian berikan Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Kepada Teman saya di Kampung Widadi, Irfan Effendi, Yuwanda Kholili. Terimakasih sudah menemani, memberikan dukungan dan menjadi sahabat yang baik ketika dalam keadaan susah dan senang. Semoga apa yang kita harapkan dan cita-citakan dipermudah oleh Allah SWT;
17. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan 2017, dan juga teman-teman KKN saya di Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat. Kepada Rivaldo Novawasa, Meltalena, Abed Nego Marbun, Aji, terimakasih telah memberikan pengalaman dan pelajaran baru di hidup saya sewaktu kuliah kerja nyata;

18. Rekan-rekan Pergerakan Islam Indonesia PMII Rayon Ilmu Sosial Ilmu Politik, Yang selalu memberikan ide dan gagasannya terkhusus bagi Sahabat-sahabat Fisip Unila;
19. Teman Seperjuangan Vio Malfino Ashari, Rendy Gustanto, Imbang Kurniawan, Ridho Handika, Yogie Murti Pratama, Heri Setiawan, Deni Riyadi, M Irfan Arrafi'I, Muhammad Nur Fahri. Yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk Penulis;
20. Kepada Sahabat saya (Life Enjoy Relax), Radika Ammorti, Aris Sandria, Restu Nopria Rhama. Terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini;
21. Kepada Sahabat Saya Dindo Purnomo, Terimakasih untuk semua dukungan, kepercayaan dan keyakinan bahwa penulis bisa, terimakasih sudah menjadi tempat untuk berbagi segala keluh kisah tentang dunia;
22. Kepada pacar saya Shinthia Francizcha, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti bagi saya, dan maaf untuk semuanya;
23. Kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya;
24. Dan juga terimakasih kepada diri saya sendiri, Alan Aska Nicola. Yang sudah bertahan dan berjuang sejauh ini dan tidak menyerah. Setelah ini harus bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang.

Bandar Lampung, 9 Oktober
2023

Penulis,

Alan Aska Nicola

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1 Kegunaan Teoritik	9
1.4.2 Kegunaan Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pengertian Peran.....	10
2.1.1 Peran Menurut Ahli.....	11
2.1.2 Fungsi Peran.....	12
2.1.3 Jenis-Jenis Peran	13
2.1.4 Dimensi Peran.....	14
2.1.5 Konsep Peran	15
2.2 Pengetian Implementasi	15
2.2.1 Internalisasi Menurut Ahli	16
2.2.2 Model-Model Implementasi.....	17
2.3 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung	20
2.4 Kerangka Pikir	20

BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Tipe Penelitian	23
3.2 Fokus Penelitian	24
3.3 Lokasi Penelitian	24
3.4 Jenis dan Sumber Data	24
3.4.1 Data Primer	25
3.4.2 Data Skunder	25
3.5 Informan Penelitian	25
3.6 Teknik pengumpulan data	26
3.6.1 Wawancara	26
3.6.2 Observasi	27
3.6.3 Dokumentasi	27
3.7 Tehnik Pengolahan Data	28
3.7.1 <i>Editing</i>	28
3.7.2 Interpretasi Data	28
3.7.3 Sistematisasi Data	28
3.8 Teknik Analisi Data	29
3.8.1 Pengumpulan Data (<i>Data Collection</i>)	29
3.8.2 Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	29
3.8.3 Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	30
3.8.4 Kesimpulan (<i>Verification</i>)	30
 BAB IV GAMBARAN UMUM	 31
4.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung	31
4.2 Tugas Dan Fungsi Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	32
4.3 Sdm Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung	38
 BAB V HASIL PENELITIAN	 40
5.1 Hasil Penelitian	40

5.2 Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung	40
5.3 Peran Fasilitator Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung ...	43
5.3.1 Peran Penyediaan Sarana dan Prasaran	45
5.3.2 Peran Pembinaan	47
5.4 Peran Regulator Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung	51
5.4.1 Peran Pembuat Kebijakan	53
5.4.2 Peran Manajerial	55
5.5 Peran Katalisator Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung	59
5.6 Analisis Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung dalam Implementasi Program Lampung Merawat Indonesia Berdasarkan teori Gede Diva (2009)	61
5.7 Analisis Tingkat Keberhasilan Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung Dengan Indikator Sasaran Utama	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
6.1 Kesimpulan	68
6.2 Saran	69

DAFTAR TABEL

Kasus Radikalisme, Intoleransi, dan Konflik yang ada di Provinsi Lampung.....	4
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	6
Tabel 3. Komposisi ASN pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Berdasarkan Pendidikan.....	38
Tabel 4. Arah kebijakan dan program badan kesatuan bangsa dan politik provinsi lampung.....	42
Tabel 5. Peran Fasilitator	46
TABEL 6. Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	54
Tabel 7. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan.....	57
Tabel 8. Tingkat keberhasilan dengan Indikator Teori Peram oleh Gede Diva (2009).....	61
Tabel 9. Tingkat Keberhasilan Peran dengan indikator sasaran Utama	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir	22
Gambar 2 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung.	31
Gambar 3.Rapat Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung..	45
Gambar 4. Pelaksanaan pembinaan sasaran SMA	48
Gambar 5. Pelaksanaan pembinaan sasaran Perguruan Tinggi.....	49
Gambar 6. Pelaksanaan Pembinaan Sasaran Partai politik	50
Gambar 7. Pelaksanaan pembinaan sasaran Masyarakat Umum	50
Gambar 8 .Rapat Kordinasi penanganan Konflik	53
Gambar 9. Web Resmi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung .	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi saat ini mengakibatkan masuknya berbagai macam paham ideologi dalam sebuah negara, selain itu berkembangnya teknologi dan informasi khususnya dalam kerangka kehidupan bernegara, memberikan berbagai macam tantangan yang dapat merusak ideologi bangsa merupakan salah satu hal yang dapat terjadi dan menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi negara. Arus informasi yang masuk dapat mengikis rasa cinta terhadap tanah air, hal inilah yang kemudian memberikan efek negatif terhadap nilai nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat. Jiwa nasionalisme terkikis karena berbagai hal, salah satunya adalah karena arus globalisasi, masuknya berbagai ideologi ditengah arus globalisasi berdampak pada memudarnya jiwa nasionalisme dikalangan masyarakat.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa Indonesia, dimana pancasila memiliki arti yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang sesuai dengan kepribadian bangsa, Pemahaman akan nilai-nilai dalam pancasila harus diajarkan dan dihayati sejak dini, walaupun ada perbedaan suku, ras di Indonesia, perbedaan itu diharapkan tidak menjadi alat perpecahan maupun permusuhan tetapi dengan adanya perbedaan tersebut diharapkan akan menjadi pemersatu bangsa, dan menjalin keakraban satu sama lainnya, pengenalan akan makna pancasila yang sejak dasar diberikan kepada generasi penerus bangsa yaitu dengan mengimplemantasikan nilai, norma, serta moral yang ada dalam pancasila kepada mahasiswa yang nantinya akan berbaur dengan masyarakat.

Nilai-nilai norma dalam Pancasila harus diterapkan secara mendasar dan kritis karena hal itu terkait dengan pembentukan karakter dari generasi penerus bangsa, karakter yang bersifat membangun agar setiap warga masyarakat dapat mengimplementasikan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, keterkaitan antara Pancasila dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara merupakan bagian dari suatu internalisasi yang akan menguatkan wawasan kebangsaan dan ideologi dari Pancasila itu sendiri, bahkan harus terus digalakkan agar tidak terjadi kelunturan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 56 Tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung kurun waktu 2019-2024, strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Peningkatan implementasi nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan arah kebijakan:

1. Melaksanakan forum-forum penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
2. Melaksanakan pembinaan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan;
3. Melaksanakan gerakan kampanye nasional terkait revolusi mental dan restorasi sosial; dan
4. Meningkatkan kinerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di daerah.

Maraknya praktek radikalisme yang mengarah pada terorisme sebenarnya bermula dari benih-benih pemikiran dan tindakan intoleran yang menghinggapi sebagian kecil kelompok masyarakat di Indonesia. Intoleransi yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia saat ini sudah sangat

mengkhawatirkan karena tidak hanya menjangkiti sebagian kecil ormas keagamaan, namun juga telah menjadi “virus” yang menyerang pemuda, remaja, siswa, mahasiswa, dan generasi muda Indonesia. Intoleransi telah terlanjur menyebar bak penyakit di kalangan dunia pendidikan, baik sekolah dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Sebagai contoh kecil, bukankah di sebagian lingkungan SMA, sadar atau tidak sadar, untuk memilih Ketua OSIS cenderung dari agama mayoritas siswa SMA tersebut?. Ditambah lagi dengan memilih pemimpin diarahkan yang seagama, pendirian rumah ibadah yang sulit, dan menghalangi orang untuk beribadah. Itu semua contoh intoleransi, yang sangat membahayakan, karena akan mendorong perilaku radikalisme, yang menyebabkan aksi terorisme. Sebagai bangsa yang telah memiliki konsensus dasar nasional, sering disebut dengan “empat pilar kebangsaan”, Indonesia harus tetap memegang teguh Pancasila, UUD NKRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Pancasila adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia sebagai perekat bangsa, fondasi negara, dan ideologi negara.

Namun pada realitanya pancasila sebagai falsafah hidup bangsa indonesia mulai tergerus oleh berbagai ideologi lain yang masuk, seperti faham Radikalisme, intoleran, yang menyebabkan konflik dan ketidakstabilan situasi di Lampung, kondisi ini diperparah dengan penetapan Lampung menjadi salah satu zona Merah untuk kasus Radikalisme, belum lagi kasus Intoleran yang terjadi dilampung.

Berikut Adalah Daftar kasus Radikalisme, Intoleransi, dan Konflik yang ada di Provinsi Lampung sepanjang 2022 sampai 2023 :

Tabel 1. kasus Radikalisme, Intoleransi, dan Konflik yang ada di Provinsi Lampung.

No	Nama/Inisial/ormas	Kasus	keterangan	Tahun
1	NG	Radikalisme	NG merupakan anggota Jamaah Islamiyah yang sudah lama buron dan masuk daftar pencarian orang (DPO). Ia tewas ditembak ketika ditangkap karena menyerang petugas	2023
2	ZK	Radikalisme	ZK merupakan tersangka lain yang tewas dalam proses penangkapan. Ia mempunyai peran untuk menyimpan dan menyembunyikan senjata api jenis M16.	2023
3	PS	Radikalisme	PS merupakan teroris yang berperan membantu aktivitas dari tersangka NG	2023
4	HH	Radikalisme	H H merupakan DPO dari konflik Poso, Sulawesi Tengah, yang kemudian bergabung ke kelompok Jamaah Islamiyah	2023
5	AM	Radikalisme	AM merupakan anggota Jamaah Islamiyah di Lampung. Keduanya juga disebut sudah merencanakan aksi teror dengan senjata api.	2023
6	KI	Radikalisme	KI Peran KI alias AS sama dengan AM. Ia anggota Jamaah Islamiyah di Lampung yang sudah merencanakan aksi teror dengan senjata api.	2023
7	Wawan Irawan	Intoleran	Perbuatan Wawan yang mengentikan dan membubarkan ibadah jemaat GKKD dinyatakan melanggar hukum. Ketua RT itu dikenai Pasal 156 a huruf a KUHP tentang penodaan agama; dan atau 175 KUHP tentang kekerasan atau ancaman kekerasan	2022

			merintangai suatu pertemuan agama yang tidak terlarang, upacara agama, atau upacara penguburan mayat	
8	1 anggota ormas laskar merah	Konflik Ormas	Anggota ormas Laskar Merah Putih di Bandar Lampung tewas dikroyok 15 orang.	2022

Sumber : *Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Lampung (2023)*

Oleh karena penelitian penting untuk di lakukan dengan tujuan untuk melihat Peran Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam menghadapi Isu-Isu Stretegis Khususnya dalam permasalahan disitegritas yang ada di provinsi Lampung. Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung perlu menindaklanjuti berbagai isu strategis dengan melaksanakan Program yang telah ditetapkan agar implementasi lampung merawat indonesia dapat terwujud dengan maksimal, sehingga provinsi lampung khususnya dapat menjadi daerah yang bebas dari ancaman disintegritas.

Program lampung merawat indonesia diharapkan dapat menjadi jawaban dari berbagai macam persoalan yang berpotensi mengganggu kondusifitas masyarakat di provinsi lampung, Peran Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tentunya diharapkan dapat memaksimalkan implementasi program yang telah ditetapkan.

Berikut adalah tabel penelitian terdahulu :

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Ilham Agung Ashariadi (2021)	PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN POLITIK DI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon berkaitan dengan proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik adalah sebagai fasilitator, secara umum telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi, namun belum bisa terlaksana dengan maksimal dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan proses pendidikan politik tersebut. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon terdapat dua faktor penghambat yaitu. hambatan teknis berkaitan dengan kuantitas dari pegawai dan kualitas dari SDM yang perlu ditingkatkan dan hambatan non teknis berkaitan dengan renysunan renstra, keterbatasan anggaran, tidak adanya silabus serta kualitas SDM masyarakat terutama dari bidang pendidikan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon telah berupaya untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut dengan melakukan berbagai langkah, antara

			lain yaitu dengan merumuskan renstra dengan fokus penyempurnaan pada kegiatan pendidikan politik, Mempersiapkan SDM yang lebih kompeten baik penyelenggara maupun narasumber, dan meningkatkan bantuan keuangan partai politik dengan catatan pengawasan yang ketat agar presentase yang digunakan untuk kegiatan pendidikan politik lebih besar atau diprioritaskan.
2	Fahmi Nurul Huda (2021)	PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG MELALUI PROGRAM JAMBOREE KEBANGSAAN	Kompetensi wawasan kebangsaan yang dibentuk oleh Bakesbangpol bermuara terhadap pembentukan kemampuan masyarakat, dalam beradaptasi, dan bersatu untuk hidup harmonis didalam keadaan masyarakat yang multikultural. Implementasi materi, dan bentuk pelaksanaan program dapat membentuk rasa, semangat, dan paham kebangsaan sebagai dimensi inti wawasan kebangsaan. Dampak minimnya pemahaman wawasan kebangsaan berimplikasi terhadap munculnya sikap apatis, intoleransi, dan kurangnya kecintaan terhadap bangsa yang menyebabkan berbagai problematika di masyarakat. Pembinaan wawasan kebangsaan menjadi upaya preventif, serta berperan dalam membentuk kemampuan sosial-politikal kewarganegaraan. Cara Bakesbangpol Kota Bandung dalam merelevansikan wawasan kebangsaan dengan perkembangan teknologi digital

			belum dirasakan secara signifikan. Sehingga, perlu adanya langkah strategis, dan realisasi konkret dengan pemberian materi terkait ancaman, dan tantangan teknologi digital dengan membentuk kecerdasan digital, dan literasi digital
3	NINDA PUSPITA DEWI (2019)	PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH	Peran Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di Jawa Tengah dengan melakukan kegiatan berupa sosialisasi, seminar dan forum diskusi. Beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan Tim Penanganan Konflik Sosial, Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial, Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat Dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini dan Pengawasan Orang Asing.

Sumber Data : *Skripsi dan Jurnal Diolah Oleh Peneliti (2023)*

Sejalan dengan hal yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan yang berjudul : “Peran Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam Implementasi Program Lampung Merawat Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan di dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Peran Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam Implementasi Program Lampung Merawat Indonesia”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

“Untuk mengetahui apakah Peran Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam Implementasi Program Lampung Merawat Indonesia sudah berjalan baik atau belum?”.

1.4 Kegunaan penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritik

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pemerintahan terutama tentang pentingnya tentang pentingnya Penguatan integritas ditengah masyarakat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dalam ilmu pemerintahan, fisp universitas lampung, dengan pembahasan Peran Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam Implementasi Program Lampung Merawat Indonesia .

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman secara luas kepada mahasiswa dan masyarakat mengenai pentingnya menjaga integritas khususnya di Provinsi Lampung.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi mahasiswa dan masyarakat untuk memperkuat Rasa Toleransi, dan menutup ruang bagi faham yang berpotensi menyebabkan Disintegritas.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan pengetahuan yang bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat, mengenai pentingnya Penguatan integritas ditengah masyarakat..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Peran ialah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Peranan ialah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Pemeranan ialah proses cara atau perbuatan memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling berkaitan, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyai bermacam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang.

Disamping itu, peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil (Fadli dalam Kozier Barbara, 2008). Peran adalah ketika seseorang memasuki lingkungan masyarakat, baik dalam skala kecil (keluarga) maupun skala besar (masyarakat luas), setiap orang dituntut untuk belajar mengisi peran tertentu. Peran sosial yang perlu dipelajari meliputi dua aspek, yaitu belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak dari suatu peran, dan memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut (Momon Sudarman, 2008).

2.1.1 Peran Menurut Para Ahli

1. Menurut Merton (dalam Raho 2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian peran juga diartikan sebagai kelengkapan dari hubungan antar manusia berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukan di masyarakat.
2. Menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”.
3. Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan

berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya

4. Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.
5. Menurut (Miftah Thoha, 1997). Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.
6. Horton dan Hunt, menjelaskan bahwa peran (role) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dari hak-hak tersebut.

2.1.2 Fungsi Peran

Menuru J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

2.1.3 Jenis-jenis Peran

Jenis-jenis peran menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (Role Strain) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau

tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

2.1.4 Dimensi Peran

Beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public supports)
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan
5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan.

2.1.5 Konsep Peran

Menurut Gede Diva (2009), menyatakan peranan yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai Fasilitator, Regulator, Dan Katalisator.

1. Peran Fasilitator

Dalam peran fasilitator pemerintah atau Lembaga memiliki peran dalam memfasilitasi semua kegiatan baik berupa kebijakan maupun program dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Peran Regulator

Peran pemerintah atau lembaga dalam regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan, pemerintah maupun lembaga berfungsi untuk menjaga kondisi suatu wilayah tetap kondusif, Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam melaksanakan fungsi regulator, pemerintah membagi wewenang pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemda juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya.

3. Peran katalisator

Dalam melaksanakan fungsi katalisator, pemerintah atau lembaga berhak mendapatkan gambaran pelaksanaan program secara menyeluruh agar program dapat terus dievaluasi untuk menetapkan capaian program sekaligus merumuskan cakupan program pada masa yang akan datang.

2.2 Pengetian Implementasi

Secara luas implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama untuk menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraih tujuan dari kebijakan program. Pada sisi yang lain dijelaskan bahwasanya implementasi merupakan

fenomena kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) dan juga suatu dampak (outcome). Misalnya implementasi dikonsepsikan sebagai suatu proses, dan serangkaian putusan yang diterima oleh lembaga untuk dijalankan.

Implementasi adalah proses dari penerapan ide, konsep dan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwasanya implementasi merupakan salah satu dari variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan masalah atau persoalan. Implementasi menempati posisi yang penting dalam proses kebijakan, suatu proses kebijakan menuntut untuk diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan dari sebuah perencanaan kebijakan. Untuk dapat memahami implementasi dari suatu kebijakan maka harus memahami hal yang menyajikan pembahasan teoritik maupun konseptual dari sebuah konsep implementasi kebijakan.

2.2.1 Implementasi menurut para ahli

1. Menurut Subarsono menjelaskan bahwasanya implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.
2. Menurut Solichin menjelaskan implementasi adalah tindakantindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabatpejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
3. Menurut Pressman dan Wildavsky menjelaskan implementasi adalah (implimentation as to carry out, accomplish, fullfil, produce, complete) membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu.

4. Menurut Wahab menjelaskan implementasi adalah tindakantindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabatpejabat-pejabat kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
5. Menurut Dunn menjelaskan implementasi merupakan tindakantindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu, ia juga menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

2.2.2 Model-Model Implementasi Menurut Para Ahli

1. Van Meter dan Van Horn Model implementasi Van Meter dan Van Horn adalah model implementasi klasik yakni model yang diperkenalkan pada tahun 1975. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Model implementasi Van Meter dan Van Horn Menawarkan model implementasi dengan memenuhi enam variabel diantaranya:
 - 1) Standard dan sasaran kebijakaan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.

- 2) Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
 - 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
 - 4) Karakteristik agen pelaksana Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
 - 5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
 - 6) Disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu: Pertama, Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Kedua, Kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan. Ketiga, Intensitas disposisi implementor yang dimiliki oleh implementor.
2. Menurut Matland Menawarkan model untuk melakukan implementasi dengan memenuhi beberapa syarat, diantaranya:
- 1) Ketepatan kebijakan ketepatan kebijakan ini dinilai dari: Pertama, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Kedua, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.
 - 2) Ketepatan pelaksanaan aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi

pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah, masyarakat atau swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (privatization atau contracting out).

- 3) Ketepatan target ketepatan berkenaan dengan tiga hal, yaitu: Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atautakah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.
- 4) Ketepatan lingkungan ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu: Pertama, lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Kedua, lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri dari atas public opinion, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretive institutions yang berkenaan dengan interpretasi lembaga lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan individuals, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan

2.3 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 56 Tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari 17 jabatan struktural berdasarkan bagan struktur Organisasi yaitu :

- 1) Kepala Badan, Pimpinan Pratama
- 2) Sekretaris, Pejabat Administrator
- 3) Kepala Bidang, Pejabat Administrator, serta
- 4) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, Pejabat Pengawas

2.4 Kerangka Pikir

Perkembangannya teknologi dan informasi Khususnya dalam kerangka kehidupan bernegara, memberikan ruang yang lebih luas bagi berbagai macam ideologi, arus informasi yang masuk dapat mengikis rasa cinta terhadap tanah air, hal inilah yang kemudian memberikan efek negatif terhadap nilai nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat. Jiwa nasionalisme terkikis karena berbagai hal, salah satunya adalah karena arus globalisasi Masuknya berbagai ideologi ditengah arus globalisasi berdampak pada mudarnya jiwa nasionalisme dikalangan masyarakat.

Maraknya praktek radikalisme yang mengarah pada terorisme sebenarnya bermula dari benih-benih pemikiran dan tindakan intoleran yang menghinggapi sebagian kecil kelompok masyarakat di Indonesia. Intoleransi yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena tidak hanya menjangkiti sebagian kecil ormas

keagamaan, namun juga telah menjadi virus yang menyerang pemuda, remaja, siswa, mahasiswa, dan generasi muda Indonesia.

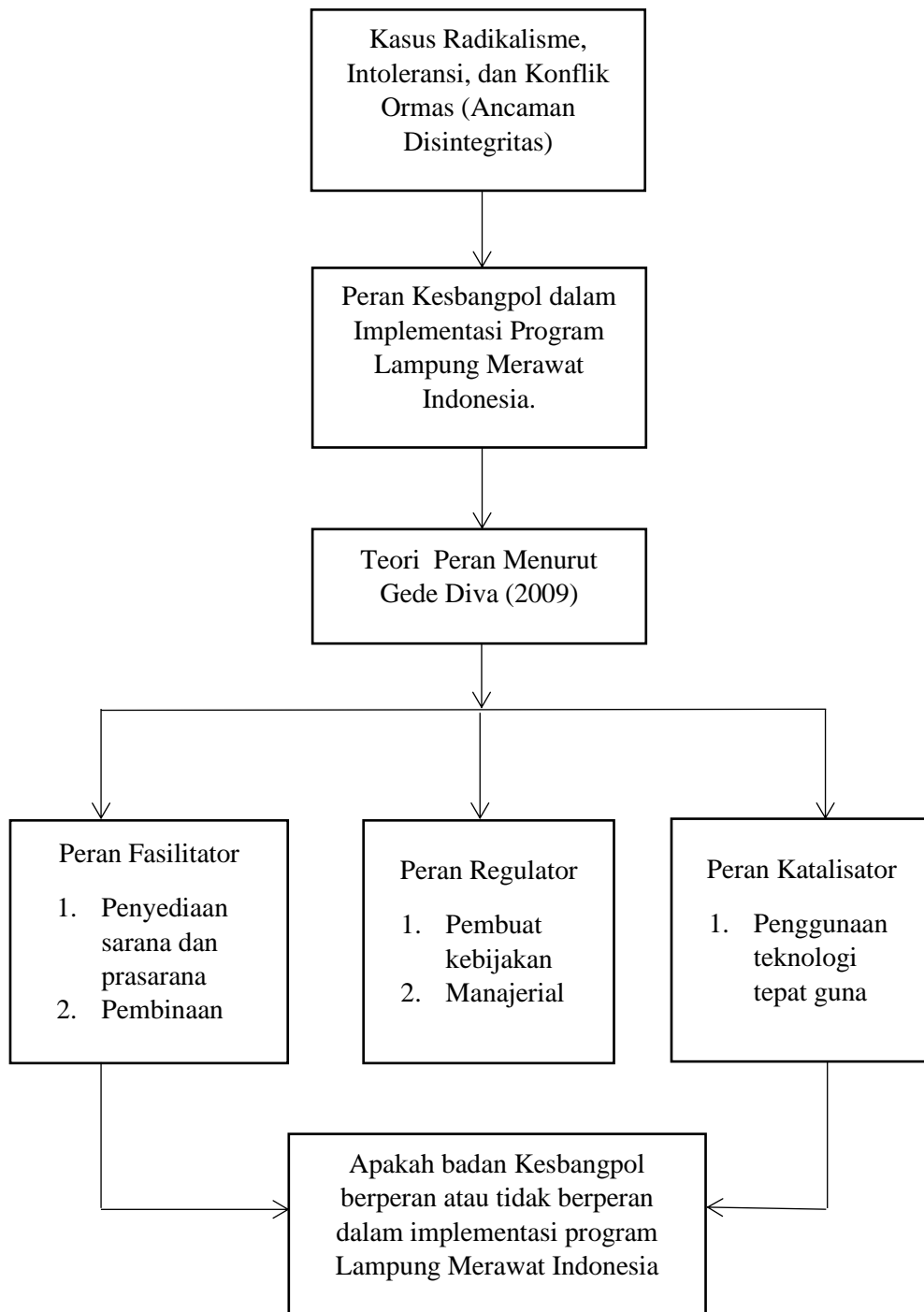
Namun pada realitanya paham Radikalisme, intoleran, yang menyebabkan konflik dan ketidakstabilan situasi di Lampung, kondisi ini diperparah dengan penetapan Lampung menjadi salah satu zona Merah untuk kasus Radikalisme, belum lagi kasus Intoleran yang terjadi di Lampung.

Penelitian penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk melihat Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam menghadapi Isu-Isu Strategis Khususnya dalam permasalahan disintegritas yang ada di provinsi Lampung. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung perlu menindaklanjuti berbagai isu strategis dengan melaksanakan Program yang telah ditetapkan agar implementasi Lampung Merawat Indonesia dapat terwujud dengan maksimal, sehingga provinsi Lampung khususnya dapat menjadi daerah yang bebas dari ancaman disintegritas.

Program Lampung Merawat Indonesia diharapkan dapat menjadi jawaban dari berbagai macam persoalan yang berpotensi mengganggu kondusifitas masyarakat di provinsi Lampung, Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tentunya diharapkan dapat memaksimalkan implementasi program yang telah ditetapkan.

Berikut adalah kerangka pemikiran peneliti terkait dengan Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Implementasi Program Lampung Merawat Indonesia dengan Menggunakan Teori Peran dari Gede Diva (2009).

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



Sumber : *Teori Peran Oleh Gede Diva (2009).*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan secara terperinci mengenai Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Dalam Meningkatkan Internalisasi Nilai Pancasila. Hal ini berkaitan dengan pengertian metode deskriptif yang menggambarkan sebuah peristiwa dan keadaan dengan sejelas-jelasnya tanpa mempengaruhi obyek yang ditelitinya (Jauhari, 2010).

Sementara itu penelitian kualitatif dalam penelitian diartikan sebagai suatu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Denzim dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif menggunakan latar belakang alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode yang ada (Moleong, 2007).

Dalam penelitian kualitatif metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Metode kualitatif digunakan dengan beberapa pertimbangan yaitu pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak (kompleks/heterogen). Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2007).

Alasan lain dari dipilih nya metode ini dikarenakan pemahaman seseorang terhadap sebuah permasalahan lebih bersifat kualitatif yang didasarkan pada persepsi, eksplorasi pemikiran, penjelasan dan pengembangan konsep (Sanyoto, 2012: 21). Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Dalam Meningkatkan Internalisasi Nilai Pancasila yang didasarkan pada persepsi, eksplorasi, pemikiran dan pengembangan konsep. Pelaksanaan penelitian ini, manusia yang menjadi instrumen penelitian. Hal tersebut sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang lentur dan mengikuti pola pemikiran manusia. Diharapkan sifat inilah mampu secara tanggap merespon kondisi dan kenyataan di lapangan selama pelaksanaan penelitian

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Moelong fokus penelitian atau pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Lestari FA & Kusumadmo E, 2016). Adapun fokus dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Dalam Meningkatkan Internalisasi Nilai Pancasila.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi dalam penelitian ini terletak di Kantor Pemerintah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiono (2003:) data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan bukan angka dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang

kemudian di analisis dalam bentuk kategori Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

3.4.1 Data Primer

Data yang diperoleh melalui pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada narasumber. Data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara berdasarkan panduan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yaitu Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa dan Kepala Sub Bidang Bela Negara Dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung.

1.4.2 Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data ini diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, buku-buku, surat kabar *online*, artikel website, dokumen-dokumen seperti Peraturan Menteri dalam Negeri.

3.5 Informan Penelitian

Informan menurut Sugiyono (2014:218) adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini ditentukan dengan purposive sampling karena peneliti meyakini bahwa informan yang dipilih adalah sebagai aktor yang mengetahui Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Internalisasi Nilai Pancasila. Berdasarkan penentuan tersebut, informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa
2. Kepala Sub Bidang Bela Negara Dan Wawasan Kebangsaan

Peneliti memilih informan tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dan dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

3.6 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah yang paling strategis dalam penelitian, pengumpulan data dapat dilakukan dalam *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Apabila dilihat dari *setting* data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya jika dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data langsung yakni primer dan sumber data sekunder (Hardani, dkk, 2020). Akan tetapi dalam penelitian kualitatif pengumpulan data pada *natural setting* atau kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiyono, 2018).

3.6.1 Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden, wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interview* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan atau bisa disebut dengan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dan memiliki maksud tertentu (Hardani, dkk, 2020). Berdasarkan hal ini peneliti akan menggali informasi yang berkaitan dengan Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Internalisasi Nilai Pancasila Dengan 2 narasumber yaitu.

3.6.2 Observasi

Observasi yaitu mengadakan pengamatan dilokasi dan pencatatan secara sistematis pada objekatau subjek penelitian kegiatan observasi meliputi melakukan pncatatan sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang diteliti dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan, peneliti memilih observasi dalam pengumpulan data pada penelitian ini untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan dalam proses wawancara. Dengan dilakukan observasi peneliti mendapatkan data-data sebagai tambahan data primer. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah peneliti mengamati Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Internalisasi Nilai Pancasila.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada, atau dengan mudah yang biasa disebut dengan kumpulan dokumen-dokumen objek yang diteliti dan merupakan data sekunder berbeda dengan teknik pengumpulan data sebelumnya yang merupakan sumber data primer karena didapatkan dari narasumber secara langsung. Metode ini merupakan teknik pengumpulan data-data yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian, dan merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam sebuah penelitian kualitatif menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Seperti dokumen-dokumen yang dimiliki Fisip, Undang-Undang yang terkait, dokumen digunakan sebagai sumber data penunjang karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan memperkuat. Moloeng dalam (Hardani, dkk, 2020) menyatakan bahwa dokumen itu dapat dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan, sedangkan dokumen resmi

berbentuk seperti catatan-catatan yang sifat dan isinya bersifat formal seperti aturan sebuah lembaga, ataupun berita yang diberitakan ke masyarakat melalui media massa.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian karena hasil dari pengolahan data akan berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Subagyo, 2006). Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

3.7.1 Editing

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan terhadap fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan.

3.7.2 Interpretasi Data

Interpretasi pada tahapan ini data penelitian yang telah di deskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya di interpretasikan sehingga dapat dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban dari informan dengan hasil yang lain, serta dari dokumentasi yang ada. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak.

3.7.3 Sistematisasi Data

Melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasab secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

3.8 Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini adalah menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Menurut Mathew B. Miles dan Michael Huberman dalam (Hardani & dkk, 2020) analisis data kualitatif yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara yaitu pengamatan yang terlibat, wawancara, dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan, tetapi analisis kualitatif tetapi menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

3.8.1 Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data, dalam penelitian kualitatif pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya atau disebut dengan triangulasi data. Pengumpulan data untuk penelitian kualitatif dapat dilakukan sehari-hari, berbulan-bulan, sehingga data yang didapatkan dapat diperoleh dengan banyak dan bervariasi (Sugiyono, 2018).

3.8.2 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, merangkum, memilih, pengabstrakan, dan transformasi data yang pokok dan sesuai dengan tema dan fokus penelitian kualitatif yang muncul dari catatan-catatan di lapangan setelah pengumpulan data atau *data collection* (Sugiyono, 2018) Sedangkan menurut Riyant menyatakan bahwa reduksi data artinya, data harus dirampingkan, dipilih mana yang penting, disederhanakan, dan diabstraksikan.

3.8.3 Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.

3.8.4 Kesimpulan (*Verification*)

Langkah keempat dari analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif, dengan demikian simpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi ada kemungkinan juga tidak dan merupakan sebuah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada (Hardani, dkk, 2020).

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 56 Tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Dengan perubahan struktur organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, tidak terdapat perubahan pada jumlah jabatan struktural, namun terjadi perubahan yang signifikan pada tugas fungsi dari lembaga tersebut terutama perubahan tugas dan fungsi dari 8 (delapan) sub bidang.

Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung.



Sumber : *Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung (2023)*

4.2 Tugas Dan Fungsi Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

1) Kepala Badan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan, teknis kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
2. Pelaksana kebijakan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksana koordinasi dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,

penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan

kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. Pelaksanaan fasilitas forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
2. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik; dan
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

2) Sekretaris

Sekretaris, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
2. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
4. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
5. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

3) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
6. bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:

- 1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- 2) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

4) Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik. Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi.

2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi.
3. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi.
4. Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi.
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :

- 1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
- 2) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik.

5) Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan

ormas dan ormas asing. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi.
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi.
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi.
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi.
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :

- 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
- 2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

6) Bidang Kewaspadaan Nasional

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan :

1. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
2. negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.
3. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.
5. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi :

- 1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen.
- 2) Sub Bidang Penanganan Konflik.

4.3 Sdm Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung

Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari 17 jabatan struktural berdasarkan bagan struktur Organisasi yaitu :

- 1) 1 Kepala Badan, Pimpinan Pratama
- 2) 1 Sekretaris, Pejabat Administrator
- 3) 4 Kepala Bidang, Pejabat Administrator, serta
- 4) 11 Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, Pejabat Pengawas Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. Komposisi ASN pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Berdasarkan Pendidikan

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 3	-	-	-
2.	Strata 2	12	5	17
3.	Strata 1	14	6	20
4.	D4	-	-	-
5.	Sarmu/D3	1	-	1
6.	SLTA	11	2	13
7.	SLTP	1	-	1
8.	SD	-	-	-

	Jumlah	39	13	52
--	---------------	-----------	-----------	-----------

Sumber : *Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung (2023)*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung telah relatif baik dengan 32,69 % berpendidikan S2 dan 38,48 % berpendidikan S1 sedangkan sisanya berpendidikan sarjana muda kebawah. Namun bila dilihat dari bidang tugas dan keahlian yang dimiliki masih belum sepenuhnya sesuai dengan formasi, persyaratan atau tuntutan pekerjaan.

Ditinjau dari kepangkatan/golongan, komposisi pegawai negeri sipil dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Golongan IV : 13 Orang
2. Golongan III : 27 Orang
3. Golongan II : 12 Orang
4. Golongan I : 0 Orang

:

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian terkait Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung dalam meningkatkan Internalisasi Nilai Pancasila dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung dalam meningkatkan Internalisasi dalam implementasi Program Lampung merawat Indonesia menurut Teori Gede Diva (2009):

1. Peran Fasilitator Melaksanakan Peran berupa penyediaan sarana dan prasarana pada pelaksanaan kegiatan atau kebijakan berupa laptop, Proyektor, speaker, materi, Konsumsi. Pemateri. Dan dalam Peran pembinaan berupa pembinaan kepada Sekolah Menengah Atas, pembinaan kepada Perguruan Tinggi, pembinaan kepada Partai Politik dan Organisasi Masyarakat dan pembinaan pada masyarakat, lembaga agama dan lembaga sosial masyarakat.
2. Peran Regulator Melaksanakan peran berupa pembuatan program dan kegiatan yang berkaitan dengan implementasi program lampung merawat indonesia, dalam peran manajerial melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pihak yang terkait dengan program yang dilaksanakan.
3. Peran katalisator melaksanakan peran berupa pembuatan web badan kesatuan bangsa dan politik provinsi lampung dalam rangka untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan apa yang dibuat, serta pelaksanaan program yang telah dilakukan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang relevan.

B. Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung dalam Implementasi Program Lampung Merawat Indonesia Dengan Indikator Sasaran Utama yaitu :

1. Sasaran SMA berupa Pembinaan dan pembentukan karakter dengan basis Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung telah melaksanakan Program atau Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung telah melaksanakan Program atau Kegiatan telah terlaksana dengan baik
2. Sasaran Perguruan Tinggi berupa Sosialisasi empat pilar, dan pembinaan Nilai Pancasila Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung telah melaksanakan Program Maupun Kegiatan telah terlaksana dengan baik
3. Sasaran Partai Politik dan Organisasi Masyarakat berupa Pembinaan Partai politik tingkat provinsi lampung.
4. Sasaran Masyarakat Umum Pembinaan berupa sosialisasi kewaspadaan nasional terhadap ATHG untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung dalam meningkatkan Internalisasi Nilai Pancasila, peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Lampung, dalam rangka menindaklanjuti Program maupun kegiatan berupa pembinaan pada sasaran yang sama.
2. Pembuatan program atau kebijakan sebagai tindak lanjut dari pembinaan maupun sosialisasi pada target seperti pada sasaran SMA berupa Paskibraka, namun pada Tiga sasaran lainnya belum ada program lebih lanjut dalam upaya memaksimalkan program yang telah dilaksanakan

DAFTAR PUSTKA

- Achmadi, Asmoro. “*Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan.*” Semarang: RaSAIL Media Group, 2009
- Adha, Muhammad Mona. (2020). *Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia.* Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan. Vol. 15 No. 1
- Almaghfiroh, N. Z. (2020). *Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda Untuk Menghadapi Disintegrasi Bangsa (Studi Kasus Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batu).* Universitas Muhammadiyah Malang.
- Anshari, Moh. “*Mengawasi Perilaku Intoleransi di Lembaga Pendidikan.*” Jurnal Pendidikan 1, no. 2 (n.d.): 74–76.
- Asmaroini, Ambiro Puji. (2017). *Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi.* Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 2. E-ISSN 2927-7057, P-ISSN 2945-2683
- Aziz, Aceng Abdul, Anis Masykhur, A Khoirul Anam, Ali Muhtarom, Idris Masudi, dan Masduki Diryat. *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam.* Diedit oleh Papay Supriatna, Alip Nuryanto, dan Saepullah. Daulat Bangsa. 2019 ed. Jakarta Pusat: Daulat Bangsa, 2019.
- Bruce J. biddle, Ricent *Developments in Role Theory*, Annual Review of Sociologi, 12, 67-92. (1986), 68.
- Chairiyah, C. (2014). *Revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai pendidikan karakter.* TRIHAYU: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An, 1(1).
- Diva, Gede., 2009, *Mengembangkan UKM melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*, Jakarta : Bakrie School of Management.
- Daman, R. (*Pancasila Dasar Falsafah Negara*). 1995. Jakarta: Rajawali Pers.

- Efyantti, Yasmi. “Peran Kesbangpol Linmas Dalam Pembinaan Organisasi SosialPolitik Dan Organisasi Kemasyarakatan”*jurnal Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman.*” *Jurnal Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18 No. 02 (2018).
- Faizah, Rohmatul. “Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Islam untuk Generasi Millenial.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang* 8, no. 1 (2020): 38–61.
- Fami, Novrizal. *Anasalisis Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan Konflik Sosial.* Lampung: Universitas Lampung, 2017. Lilieri, Alo. No Title. Ed
- Febriansyah, Ferry Irawan. (2017). *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa.* *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 29
- Gifari, A., Rispawati, R., & Yuliatin, Y. (2019). *Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme di lingkungan sekolah Islam (studi di Mts Al-Falah Pancor Dao Lombok Tengah).* *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 6(2), 107–120.
- Haedar Akib, “Analisis Implementasi,” *Jurnal Administrasi Publik* 1 (2010): 5.
- Hendri, H., Darmawan, C., & Halimi, M. (2018). *Penanaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan santri di pondok pesantren.* *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(2), 103–110.
- Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila Pandangan hidup Bangsa Indonesia.* Yogyakarta: Paradigma. .
- Miliano, N., & Dewi, D. A. (2021). *Re-Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Sosial Budaya Indonesia.* *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora* Vol. 1 No. 4, 1-7.
- Moloeng, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang *Pusat Pendidikan*

Wawasan Kebangsaan;

Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 tentang *Kesadaran Bela Negara*

Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang *Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;*

Rismawati. “*Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Era Reformasi.*” Seminar Nasional : Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Era Reformasi, 2011.

Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Subarsono AG, Analisis kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 30

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013), h. 213

Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen Strategi.* Bandung: CV. Mandar Maju.

Paul B. Horton and Chester L. Hunt, *Sociologi* Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari Jilid Satu Edisi Keenam (Jakarta: Erlangga, 1987), 118.

Phlien, Pravita Firstanty. *Pembinaan Wawasan Kebangsaan Oleh Kantor Kesbangpol Bagi Siswa SMA/SMK Kabupaten Majalengka.* Majalengka: Universitas Negeri Ssemarang, 2016.

Widi Rahayu, Rini Restio. *Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bintan Dalam Penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkoba.* Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2018.

Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi* (Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2015), 54.

Zulfikar, G., & Permady, G. C. (2021). *Citra Wawasan Kebangsaan Generasi Muda: suatu kajian terhadap sikap anti radikalisme.* Jurnal Educatio FKIP UNMA, 7(2), 419–424.